

## DAFTAR PUSTAKA

- (mubakab.go.id). (2024). *SEJARAH SINGKAT PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN*. <https://mubakab.go.id/halaman-kedudukan>
2023. (n.d.). *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan*. Retrieved April 4, 2024, from <https://peraturan.go.id/id/uu-no-6-tahun-2002>
- Adah, A., & Gresik, B. (n.d.). *I. pendahuluan 1.1*.
- Anitatul Fijriah, Lilis Sulistiya Nengrum, & Sena Wahyu Purwanza. (2022). Gambaran Peran Tokoh Masyarakat Terkait Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. *Nursing Information Journal*, *1*(2), 56–60. <https://doi.org/10.54832/nij.v1i2.189>
- Chariri, A. (2009). Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif. *Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli – 1 Agustus 2009*.
- Harry suhendra. (n.d.). *H Askolani Uraikan Sejarah Berdirinya Kabupaten Banyuasin*. BAPEDA KAB. BANYUASIN. Retrieved May 6, 2024, from <http://bapenda.banyuasinkab.go.id/baca-berita-6-h-askolani-uraikan-sejarah-berdirinya-kabupaten-banyuasin.html>
- Mardiah. (2020). *Pengaruh peran dan inovasi terhadap kinerja pegawai di unit Ptpn iv Kebun Marihat. Manajemen: Jurnal Ekonomi*, *2*(2), 124-133.
- Mince, Yare. (2021). *Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor*. *3*(2), 17–28.
- Pakpahan, A. F., Prasetio, A., Negara, E. S., Gurning, K., Situmorang, R. F. R., Tasnim, T., Sipayung, P. D., Sesilia, A. P., Rahayu, P. P., Purba, B., Chaerul, M., Yuniwati, I., Siagian, V., & Rantung, G. A. J. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah*.
- Porawouw, R. (2016). Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan. *Jurnal Ilmu Politik*, *3*(1), 1–16.
- PUTRA, A. W. (2017). *“RASIONALITAS PARTAI POLITIK DALAM MENGUSUNG PASANGAN CALON (DODI REZA ALEX NOERDIN-BENI HERNEDI) PEMILUKADA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN*

2017.”

- Rafsanjani, H. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah ( Pendekatan Psikologi Sosial ). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267–278.
- RAHMAWAN. (2022). *PEMEKARAN DESA DITINJAU DARI ASPEK OTONOMI DESA DI KECAMATAN RIMBO ULU KABUPATEN TEBO (Doctoral dissertation, HUKUM)*.
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal Governance*, 1(2), 1–9.
- Ramadhani. (2018). *PROSES POLITIK DALAM UPAYA PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN BERAU PESISIR SELATAN (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang)*.
- Rapa’i. (2021). *DEKADENSI MORAL REMAJA DAN PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENGUATKAN PERILAKU KEAGAMAAN DI PERUMAHAN GRUJUGAN. Tsaqofah: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 89-111.
- Saputra, I., & Dalimunthe, D. (2021). *EL-THAWALIB*. 2(5), 429–442.
- SAR, P. (2021). *Analisis Fiqih Siyarah Terhadap Peran Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi di Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)*.
- Setiawan, I. (2018). *Handbook pemerintahan daerah. Wahana Resolusi*, 2018.
- Sudarmono. (2021). *ISU PEMEKARAN WILAYAH SEBAGAI KOMODITAS POLITIK DALAM MASYARAKAT TO PULO DI KABUPATEN SELAYAR. Jurnal Politik Profetik*, 9(2), 1-23.
- Sudarsana, I. K. (2016). Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upaya pembangunan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.25078/jpm.v1i1.34>
- Syardiansah, S. (2019). Peranan Kuliah Kerja Nyata Sebagai Bagian Dari Pengembangan Kompetensi Mahasiswa. *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)*, 7(1), 57–68. <https://doi.org/10.33884/jimupb.v7i1.915>
- Trisnawati. (2015). *Analisis Peran Aktor dalam Pemekaran Kabupaten Brebes*.

*Journal of Politic and Government Studies, 4(2), 86-100.*

Tsauri, S. (2013). "*Manajemen Sumber Daya Manusia.*" (2013).

UU No. 31, 2005. (2004). Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demographic Research, 1957(1), 4-7.*

Wasistiono, Sadu, et al. (2012). *Parameter Daerah Persiapan: Penjelasan Teknis Pembentukan Daerah Otonom Baru Dalam Desain Besar Penataan Daerah. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2012.*

Yaqin. (2022). *PEMEKARAN WILAYAH CIREBON TIMUR SEBAGAI KABUPATEN/DAERAH OTONOM BARU DALAM PERSEPSI ANGGOTA DPRD DAN TOKOH MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON (Doctoral dissertation, S1 Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon).*